



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Triwulan I



**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II**

TAHUN ANGGARAN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Triwulan I BP3KP Kalimantan II TA 2026 ini dapat disusun dengan baik dan lancar. Laporan ini merupakan wujud komitmen kami dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam periode triwulan berjalan.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja, realisasi program, kendala yang dihadapi, serta langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam implementasi program dan kegiatan di periode selanjutnya.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan kerja sama sehingga laporan ini dapat tersusun dengan baik. Harapannya, Laporan Kinerja ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja organisasi secara lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan serta menjadi dasar pengambilan keputusan dalam peningkatan kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas ke depan.

Samarinda, 15 April 2026

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kalimantan II



Mustofa Otlan, S.T., M.M.
NIP. 19830318 200901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.2.1 Tugas.....	3
1.2.2 Fungsi.....	3
1.3 Struktur Organisasi.....	4
1.4 Sumber Daya Manusia.....	4
BAB II CAPAIAN KINERJA	9
2.1 Target Kinerja Triwulan I	9
2.2 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Renstra	25
2.3 Capaian Target Triwulan	37
2.3.1 Capaian Target Triwulan I DIPA Sekretariat Jenderal	37
2.3.2 Capaian Target Triwulan I DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman ..	38
2.3.3 Capaian Target Triwulan I DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan .	41
2.3.4 Capaian Target Triwulan I DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan ..	43
2.3.5 Capaian Target Triwulan I DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	46
2.4 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan.....	48
BAB III PENUTUP	51
3.1 Kesimpulan	51
3.2 Rencana Tindak Lanjut	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai BP3KP Kalimantan II	5
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai BP3KP Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Bidang Pendidikan	5
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai BP3KP Kalimantan II Berdasarkan Status Kepegawaian	6
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai BP3KP Kalimantan II Berdasarkan Golongan	6
Tabel 2.1	Kronologi Revisi Dokumen	9
Tabel 2.2	Target Kinerja BP3KP Kalimantan II TA 2026 DIPA Sekretariat Jenderal	10
Tabel 2.3	Target Kinerja BP3KP Kalimantan II TA 2026 DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	13
Tabel 2.4	Target Kinerja BP3KP Kalimantan II TA 2026 DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	16
Tabel 2.5	Target Kinerja BP3KP Kalimantan II TA 2026 DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	19
Tabel 2.6	Target Kinerja BP3KP Kalimantan II TA 2026 DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....	22
Tabel 2.7	Metode Pengukuran Kinerja Berdasarkan Renstra	26
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Triwulan I BP3KP Kalimantan II DIPA Sekretariat Jenderal ..	37
Tabel 2.9	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I BP3KP Kalimantan II DIPA Sekretariat Jenderal terhadap Target Rencana Aksi Kinerja TA 2026	38
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Triwulan I BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	39
Tabel 2.11	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman terhadap Target Rencana Aksi Kinerja TA 2026	40
Tabel 2.12	Capaian Kinerja Triwulan I BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	41
Tabel 2.13	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan terhadap Target Rencana Aksi Kinerja TA 2026	43
Tabel 2.14	Capaian Kinerja Triwulan I BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	44
Tabel 2.15	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan terhadap Target Rencana Aksi Kinerja TA 2026	46

Tabel 2.16	Capaian Kinerja Triwulan I BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....	47
Tabel 2.17	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko terhadap Target Rencana Aksi Kinerja TA 2026	47
Tabel 2.18	Ringkasan Potensi dan Permasalahan serta Rencana Tindak Lanjut	48
Tabel 3.1	Perbandingan Rencana dan Realisasi Seluruh DIPA pada Triwulan III	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BP3KP Kalimantan II	4
Gambar 1.2 Jumlah Pegawai BP3KP Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Gambar 1.3 Pegawai BP3KP Kalimantan II Berdasarkan Status Kepegawaian	6
Gambar 1.4 Pegawai BP3KP Berdasarkan Golongan	7
Gambar 2.1 DIPA Sekretariat Jenderal Revisi ke 1 Tahun Anggaran 2026	12
Gambar 2.2 DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Revisi Ke 2 Tahun Anggaran 2026	15
Gambar 2.3 DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Revisi ke 2 Tahun Anggaran 2026	18
Gambar 2.4 DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Revisi ke 2	22
Gambar 2.5 DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Revisi ke 1 ...	24



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 1

Pendahuluan

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kalimantan II

Tahun Anggaran
2026



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja triwulan disusun sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam kurun waktu tiga bulan. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja, perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, serta kendala yang muncul selama periode triwulan berjalan. Selain itu, laporan ini berfungsi sebagai instrumen monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana strategis dan prinsip tata kelola yang baik.

Laporan Triwulan I merupakan bagian dari sistem pelaporan kinerja yang disusun secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Maret tahun anggaran berjalan. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja, baik dari aspek fisik maupun keuangan, serta sebagai sarana evaluasi terhadap tingkat kesesuaian antara perencanaan dan realisasi yang telah ditetapkan.

Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi, Laporan Triwulan I memuat informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan, tingkat pencapaian target kinerja, serta berbagai kendala yang dihadapi selama periode pelaporan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah tindak lanjut guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pada triwulan berikutnya.

Penyusunan laporan ini juga mengacu pada dokumen perencanaan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat, terukur, dan akuntabel sebagai bahan pengambilan keputusan serta perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

1.2 Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman dan secara teknis berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.2.1 Tugas

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II memiliki tugas untuk melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi serah terima aset.

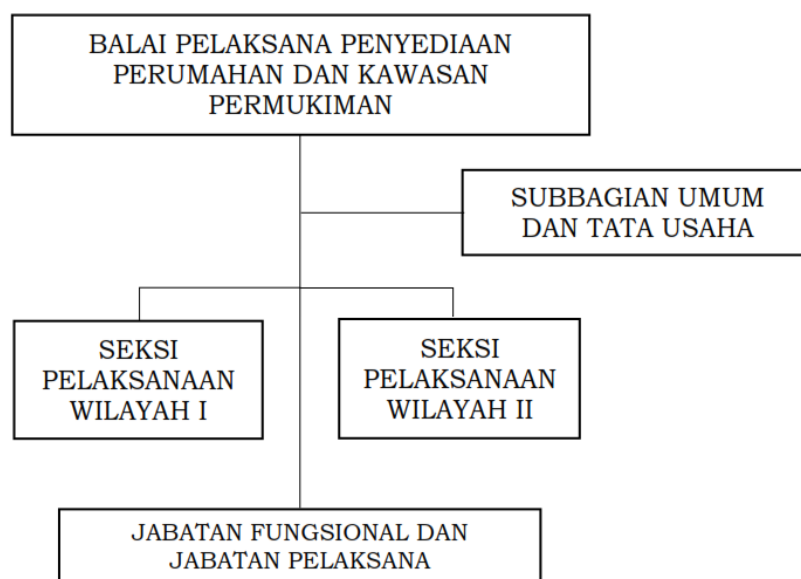
1.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. Penyusunan rencana teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II terdiri dari Subbagian Umum dan Tata Usaha, Seksi Pelaksanaan Wilayah I, dan Seksi Pelaksanaan Wilayah II. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II merupakan satu diantara satu unit organisasi yang ada di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memiliki 4 wilayah kerja yaitu Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), dan IKN Nusantara. Adapun struktur organisasi dari Balai Pelaksana Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II di tunjukan pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BP3KP Kalimantan II

1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam konteks BP3KP Kalimantan II, SDM berperan strategis dalam menunjang keberhasilan program dan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan SDM yang optimal, baik dari aspek jumlah, kompetensi, maupun distribusinya. Berikut adalah gambaran kondisi SDM BP3KP Kalimantan II yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan dalam pengelolaan kegiatan yang berjalan, sebagai dasar dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara efektif dan akuntabel. Berikut adalah jumlah pegawai BP3KP Kalimantan II yang terdata pada tahun 2026.

Tabel 1.1 Data Pegawai BP3KP Kalimantan II

No	Unit Kerja	Pegawai				Total
		PNS	CPNS	PPPK	Non PNS	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	20	7	10	43
2	Satuan Kerja PKP Kalimantan Timur	6	9	11	0	26
3	Satuan Kerja PKP Ibu Kota Negara Nusantara	8	10	4	22	44
4	Satuan Kerja PKP Kalimantan Selatan	5	7	15	5	32
5	Satuan Kerja PKP Kalimantan Utara	3	8	6	0	17
Total Keseluruhan		28	54	43	37	162

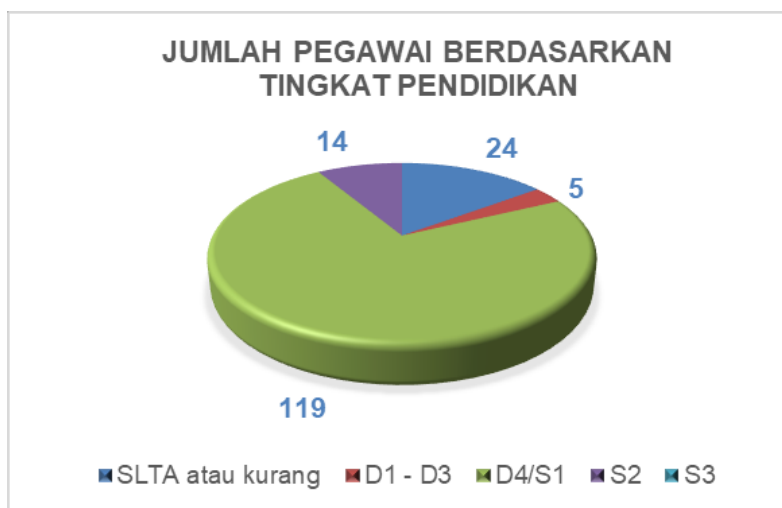
Sumber: Data BP3KP Kalimantan II

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan merupakan indikator penting dalam menggambarkan kualitas sumber daya manusia pada suatu organisasi. Komposisi ini mencerminkan tingkat kompetensi pegawai serta menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan SDM guna mendukung pencapaian kinerja organisasi. Berikut adalah jumlah pegawai BP3KP Kalimantan II berdasarkan tingkat Pendidikan.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai BP3KP Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Bidang Pendidikan

Pendidikan	Bidang Pendidikan		Jumlah
	Teknik	Non Teknik	
SLTA atau kurang	0	24	24
D1 - D3	2	3	5
D4/S1	90	29	119
S2	13	1	14
Total	105	57	162

Sumber: Data BP3KP Kalimantan II

**Gambar 1.2** Jumlah Pegawai BP3KP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

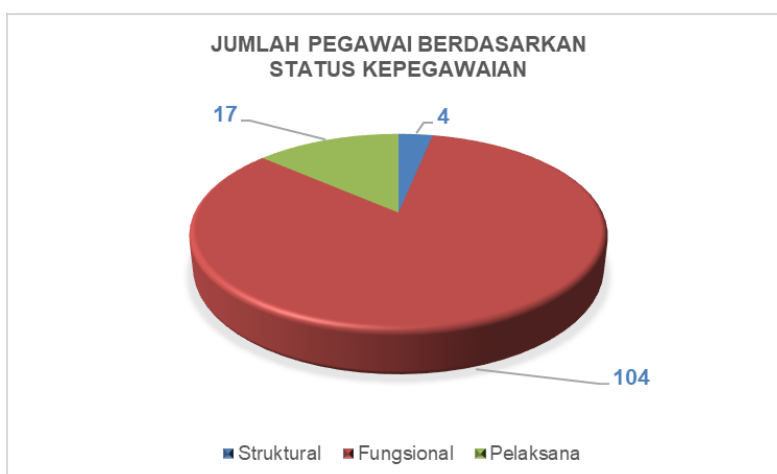
Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian merupakan salah satu aspek penting dalam menggambarkan struktur sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Pengelompokan ini memberikan gambaran mengenai komposisi pegawai, baik yang berstatus structural, fungsional, maupun pelaksana, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengelolaan SDM, perencanaan kebutuhan pegawai, serta optimalisasi kinerja organisasi

secara keseluruhan. Berikut adalah jumlah pegawai BP3KP Kalimantan II berdasarkan status kepegawaian.

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai BP3KP Kalimantan II Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Struktural	4	0	4
Fungsional	67	37	104
Pelaksana	14	3	17
Total	85	40	125

Sumber: Data BP3KP Kalimantan II



Gambar 1.3 Pegawai BP3KP Kalimantan II Berdasarkan Status Kepegawaian

Jumlah pegawai berdasarkan golongan merupakan indikator penting dalam menggambarkan struktur dan jenjang karier aparatur sipil negara dalam suatu organisasi. Pengelompokan ini mencerminkan tingkat kepangkatan, pengalaman, serta tanggung jawab yang diemban, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengelolaan SDM, pembinaan karier, dan perencanaan kebutuhan pegawai guna mendukung peningkatan kinerja organisasi.

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai BP3KP Kalimantan II Berdasarkan Golongan

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Golongan III/a	40	17	57
Golongan III/b	2	4	6
Golongan III/c	2	0	2
Golongan III/d	6	1	7
Golongan IV/a	8	0	8
Golongan IV/b	1	1	2
Total	59	23	82

Sumber: Data BP3KP Kalimantan II



Gambar 1.4 Pegawai BP3KP Berdasarkan Golongan

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan aspek strategis dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Upaya pengelolaan SDM dilakukan melalui perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, serta pengelolaan kinerja yang terukur guna meningkatkan produktivitas dan profesionalisme. Dalam rangka memastikan efektivitas tersebut, pelaksanaan analisis jabatan pada akhir tahun menjadi instrumen penting sebagai bahan evaluasi terhadap tingkat produktivitas dan kesesuaian beban kerja pegawai, dimana hasil evaluasi tersebut akan disampaikan dalam laporan kinerja akhir tahun. Hasil analisis jabatan tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam penyempurnaan penataan SDM, baik dari sisi jumlah, kualitas, maupun distribusinya. Dengan demikian, pengelolaan SDM diharapkan semakin optimal, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan organisasi ke depan.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 2

Capaian Kinerja

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kalimantan II

Tahun Anggaran
2026



BAB II CAPAIAN KINERJA

2.1 Target Kinerja Triwulan I

Target kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun berdasarkan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026. Penetapan target ini menjadi acuan dasar bagi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan II dalam mengarahkan pelaksanaan program serta kegiatan agar berjalan efektif dan terukur sepanjang tahun berjalan. Adapun target kinerja BP3KP Kalimantan II Tahun 2026 disusun berdasarkan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) efektif yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja pada Triwulan I yaitu sebagai berikut.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Jenderal Kementerian PKP Nomor 167/ND/Sj.01/2026, untuk penetapan Target Kinerja serta Anggaran merujuk pada dokumen DIPA yang terbit setelah revisi RO khusus. Sehubungan dengan hal tersebut dasar dari penyusunan Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dengan seluruh Unit Organisasi Kementerian PKP merujuk pada DIPA Revisi ke 1 untuk seluruh DIPA yang diampu oleh BP3KP Kalimantan II, dan untuk Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan seluruh Unit Organisasi terkait merujuk pada DIPA Revisi ke 2. Dikarenakan pada saat penyusunan Dokumen Rencana Aksi ini telah dilakukan 2 kali Revisi DIPA, berikut adalah kronologi revisi DIPA dan disertai revisi Perjanjian Kinerja yang terjadi pada Triwulan I.

Tabel 2.1 Kronologi Revisi Dokumen

No	Dokumen	Tanggal Awal	Tanggal Revisi ke 1	Tanggal Revisi ke 2
1	DIPA Sekretariat Jenderal	01/12/2025	29/12/2025	-
	Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Sekretariat Jenderal	10/04/2026	-	-
2	DIPA Ditjen Kawasan Permukiman	01/12/2025	29/12/2025	18/02/2026
	Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Ditjen Kawasan Permukiman	30/03/2026	30/03/2026	-
3	DIPA Ditjen Perdesaan	01/12/2025	29/12/2025	13/02/2026
	Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Ditjen Perdesaan	02/04/2026	02/04/2026	-
4	DIPA Ditjen Perkotaan	01/12/2025	29/12/2025	13/02/2026
	Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Ditjen Perkotaan	30/03/2026	30/03/2026	-
5	DIPA Ditjen TKPR	01/12/2025	29/12/2025	-
	Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Ditjen TKPR	28/01/2026	-	-

Sumber: DIPA BP3KP Kalimantan II dan Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II

Dalam proses penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026 terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh adanya proses penyesuaian terhadap kebijakan dan target kinerja yang masih dalam tahap finalisasi, baik di tingkat unit kerja maupun unit organisasi di atasnya. Selain itu, keterlambatan juga dipengaruhi oleh proses koordinasi dan sinkronisasi data kinerja yang memerlukan waktu lebih lama guna memastikan keselarasan antara indikator, target, dan alokasi anggaran yang ditetapkan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Awal dan Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP Kalimantan II dengan seluruh Unit Organisasi terkait disertai dengan DIPA yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja tersebut berikut adalah target yang ditetapkan pada masing-masing DIPA yang diampu oleh BP3KP Kalimantan II.

A. DIPA Sekretariat Jenderal

Target kinerja yang tertuang dalam DIPA Revisi ke 1 Sekretariat Jenderal menjadi dasar penetapan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Sekretariat Jenderal, dan pada pelaksanaannya Perjanjian Kinerja Awal ini menjadi indikator kinerja dalam menjalankan target pada kegiatan BP3KP Kalimantan II DIPA Sekretariat Jenderal. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan target pada pelaksanaan kegiatan pada DIPA Sekretariat Jenderal dapat berubah seiring dengan terjadinya perubahan target dan pagu anggaran dengan terbitnya DIPA Revisi yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Revisi. Berikut adalah Target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Sekretariat Jenderal yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada DIPA Sekretariat Jenderal.

Tabel 2.2 Target Kinerja BP3KP Kalimantan II TA 2026 DIPA Sekretariat Jenderal

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target PK	Aktivitas	Target Capaian Triwulan I
Sekretariat Jenderal				
Program Dukungan Manajemen				
SK 1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II			
1	Jumlah Layanan Umum	5 Layanan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan	10,45%
	Balai P3KP Kalimantan II	1 Layanan		10,45%
	Satker PKP Kaltim	1 Layanan		10,45%
	Satker PKP Kalsel	1 Layanan		10,45%
	Satker PKP Kaltara	1 Layanan		10,45%
	Satker PKP IKN	1 Layanan		10,45%
2	Jumlah Layanan Perkantoran	5 Layanan		10,45%
	Balai P3KP Kalimantan II	1 Layanan		10,45%
	Satker PKP Kaltim	1 Layanan		10,45%
	Satker PKP Kalsel	1 Layanan		10,45%

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target PK	Aktivitas	Target Capaian Triwulan I
	Satker PKP Kaltara	1 Layanan		10,45%
	Satker PKP IKN	1 Layanan		10,45%
3	Jumlah Layanan Sarana Internal	21 Unit		10,45%
	Balai P3KP Kalimantan II	1 Unit		10,45%
	Satker PKP Kaltim	1 Unit		10,45%
	Satker PKP Kalsel	8 Unit		10,45%
	Satker PKP Kaltara	1 Unit		10,45%
	Satker PKP IKN	10 Unit		10,45%
NO	SATUAN KERJA		PAGU	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II		Rp 1.312.809.000,00	
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur		Rp 573.479.000,00	
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan		Rp 699.472.000,00	
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara		Rp 768.377.000,00	
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara		Rp 1.112.116.000,00	
TOTAL			Rp 4.466.253.000,00	

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Sekretariat Jenderal

Adapaun target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Sekretariat Jenderal disusun berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 1 Tanggal 29 Desember 2025.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691412/2026



05 6037 7094 1905 4736

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	: (16)	KALIMANTAN TIMUR
4. Kode/Nama Satker	: (691412)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar	: Rp.	1.312.809.000 (SATU MILIAR TIGA RATUS DUA BELAS JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA Program Dukungan Manajemen

146.01.WA Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.312.809.000	4. Pinjaman Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN : SAMARINDA (046) Rp. 1.312.809.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA di atas sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Revisi ke 01
Tanggal : 29 Desember 2025

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN						 DS 9237-7094-1905-8796	
TAHUN ANGGARAN 2026							
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691412/2026							
I A. INFORMASI KINERJA							
Kementerian Negara/Lembaga : (146)		KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				Halaman : I A. 1	
Unit Organisasi : (01)		SEKRETARIAT JENDERAL					
Provinsi : (16)		KALIMANTAN TIMUR					
Kode/Nama Salkes : (691412)		Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II					
Program	:	146.01.WA	Program Dukungan Manajemen				1.312.809.000
Kegiatan	:	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal				1.312.809.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		1.127.470.000
Rincian Output	:	01 EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan		49.208.000
	:	02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan		1.078.262.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7665.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00	Unit, m2, Paket		185.339.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	1,00	Unit		185.339.000

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIS JENDERAL
td.
DIDYK CHOIROEL
NIP. 197104181902011001

Gambar 2.1 DIPA Sekretariat Jenderal Revisi ke 1 Tahun Anggaran 2026

B. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Target kinerja yang tertuang dalam DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menjadi dasar penetapan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Pada pelaksanaannya DIPA Ditjen KP telah mengalami dua kali revisi yaitu Revisi ke 1 pada tanggal 29 Desember 2025 dan DIPA Revisi ke 2 pada tanggal 18 Februari 2026. Sehubungan dengan hal tersebut Perjanjian Kinerja DIPA Ditjen KP telah mengalami satu kali revisi sehingga terdapat Perjanjian Kinerja Awal dan Perjanjian Kinerja Revisi ke 1, Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 inilah yang menjadi indikator kinerja dalam menjalankan target pada kegiatan BP3KP Kalimantan II pada DIPA Ditjen KP. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan target pada pelaksanaan kegiatan pada DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dapat berubah seiring dengan terjadinya perubahan target dan pagu anggaran dengan terbitnya DIPA Revisi yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Revisi selama tahun anggaran berjalan. Berikut adalah Target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.

Tabel 2.3 Target Kinerja BP3KP Kalimantan II TA 2026 DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target PK	Aktivitas	Target Capaian Triwulan I
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman				
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
SK 1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni			
1	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	Tw I – Perencanaan dan Persiapan	10,45%
2	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan		10,45%
SK 2	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan yang terlayani PSU kawasan permukiman			
1	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Lahan dan Fasilitasi PSU	1 Dokumen	Tw I – Perencanaan dan Persiapan	10,45%
2	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	60 Unit		10,45%
	Satuan Kerja PKP Kalsel	60 Unit	Tw I – Perencanaan dan Persiapan	10,45%
SK 3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman			
1	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	Tw I – Perencanaan dan Persiapan	10,45%
2	Jumlah Unit Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	900 Unit		10,45%
	Satker PKP Kaltim	300 Unit		10,45%
	Satker PKP Kalsel	600 Unit		10,45%
Program Dukungan Manajemen				
SK 1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman			
1	Jumlah Layanan Umum	5 Layanan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan	10,45%
	Balai P3KP Kalimantan II	1 Layanan		10,45%
	Satker PKP Kaltim	1 Layanan		10,45%
	Satker PKP Kalsel	1 Layanan		10,45%
	Satker PKP Kaltara	1 Layanan		10,45%
	Satker PKP IKN	1 Layanan		10,45%
2	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan		10,45%
3	Jumlah BMN	1 Layanan		10,45%
NO	SATUAN KERJA		PAGU	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II		Rp 531.045.000	
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur		Rp 6.755.484.000,00	

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target PK	Aktivitas	Target Capaian Triwulan I
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan			Rp 14.249.835.000,00
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara			Rp 45.471.000,00
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara			Rp 55.421.000,00
Total				Rp 21.637.256.000,00

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Adapaun target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman disusun berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 2 Tanggal 18 Februari 2026 untuk pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026**
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691466/2026



DS 3091-0048-6020-3566

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	: (16)	KALIMANTAN TIMUR
4. Kode/Nama Saker	: (691466)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar	: Rp.	531.045.000 (LIMA RATUS TIGA PULUH SATU JUTA EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupaiah Murni	Rp.	531.045.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencatatan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SAMARINDA (046) Rp. 531.045.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan saker dan pencatatan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasid Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman II DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Revisi ke 02
Tanggal : 18 Februari 2026

Terlampir
Terlampir

Jumlah Uang

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : DIPA- 146.03.1.691466/2026 I A. INFORMASI KINERJA					
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR Kode/Nama Satker : (691466) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II					
					
Halaman : I A. 1					
Program	: 146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			429.129.000
Kegiatan	: 7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman			429.129.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:				
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7659.BMA	Data dan Informasi Publik	1,00	dokumen, Peta, Data	36.910.000
Rincian Output	: 01 BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1,00	dokumen	36.910.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 7659.CBR	Dukungan Teknis	2,00	Dokumen	275.467.000
Rincian Output	: 01 CBR.001	Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Fasilitas PSU	1,00	Dokumen	160.000.000
	: 02 CBR.002	Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1,00	Dokumen	115.467.000
Klasifikasi Rincian Output 3	: 7659.PBF	Kebijakan Bidang Serana dan Prasarana	1,00	Rekomendasi Kebijakan	116.752.000
Rincian Output	: 01 PBF.001	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	116.752.000
Program	: 146.03.WA	Program Dukungan Manajemen			101.916.000
Kegiatan	: 7674	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman			101.916.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:				
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7674.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	101.916.000
Rincian Output	: 01 EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	59.574.000
	: 02 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	15.342.000
	: 03 EBA.206	Layanan BMN	1,00	Layanan	27.000.000

Jakarta, 01 Desember 2025
 a.n. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
 ttd.
 Ir. Filrah Nur, M.Si
 NIP. 196704191094031003

Gambar 2.2 DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Revisi Ke 2
 Tahun Anggaran 2026

C. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Target kinerja yang tertuang dalam DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menjadi dasar penetapan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Pada pelaksanaannya DIPA Ditjen Perdesaan telah mengalami dua kali revisi yaitu Revisi ke 1 pada tanggal 29 Desember 2025 dan DIPA Revisi ke 2 pada tanggal 13 Februari 2026. Sehubungan dengan hal tersebut Perjanjian Kinerja DIPA Ditjen Perdesaan telah mengalami satu kali revisi sehingga terdapat Perjanjian Kinerja Awal dan Perjanjian Kinerja Revisi ke 1, Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 inilah yang menjadi indikator kinerja dalam menjalankan target pada kegiatan BP3KP Kalimantan II pada DIPA Ditjen Perdesaan. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan target pada pelaksanaan kegiatan pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dapat berubah seiring dengan terjadinya perubahan target dan pagu anggaran dengan terbitnya DIPA Revisi yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Revisi selama tahun anggaran berjalan. Berikut adalah Target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Tabel 2.4 Target Kinerja BP3KP Kalimantan II TA 2026 DIPA Direktorat Jenderal Perumahan
Perdesaan

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target PK	Aktivitas	Target Capaian Triwulan I
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan				
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan	10,45%
2	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Dokumen		10,45%
3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3 Laporan		10,45%
	Satker PKP Kaltim	1 Laporan		10,45%
	Satker PKP Kalsel	1 Laporan		10,45%
	Satker PKP Kaltara	1 Laporan		10,45%
SK 2	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan			
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan	10,45%
2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan		10,45%
SK 3	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan			
1	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan	10,45%
2	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	5400 Unit		10,45%
	Satker PKP Kaltim	1800 Unit		10,45%
	Satker PKP Kalsel	2700 Unit		10,45%
	Satker PKP Kaltara	900 Unit		10,45%
Program Dukungan Manajemen				
SK 1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan			
1	Jumlah Layanan Umum	4 Layanan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan	10,45%
	Balai P3KP Kalimantan II	1 Layanan		10,45%
	Satker PKP Kaltim	1 Layanan		10,45%
	Satker PKP Kalsel	1 Layanan		10,45%
	Satker PKP Kaltara	1 Layanan		10,45%
SK 2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			
1	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan	10,45%

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target PK	Aktivitas	Target Capaian Triwulan I
SATUAN KERJA			PAGU	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II			Rp 382.014.000,00
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur			Rp 39.752.786.000,00
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan			Rp 58.857.442.000,00
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara			Rp 20.097.176.000,00
TOTAL			Rp 119.089.418.000,00	

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Adapun target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan disusun berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 2 Tanggal 13 Februari 2026 untuk pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691520/2026



050469-9100-3095-3506

Revisi ke 02
 Tanggal : 13 Februari 2026

A. Dasar Hukum:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. UU No. 17 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2. Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	
3. Provinsi	: (16)	KALIMANTAN TIMUR	
4. Kode/Nama Sektir	: (691520)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	
Sebesar	: Rp.	382.014.000	(TIGA RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA EMPAT BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	382.014.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
 1. KPPN SAMARINDA (046) Rp. 382.014.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 2. DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan saikler dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti bukti yang ada).
 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691520/2026
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
 Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
 Kode/Nama Salter : (691520) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

						Halaman : I A. 1	
Program	:	146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			358.070.000	
Kegiatan	:	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			358.070.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	3,00	Rekomendasi Kebijakan	292.075.000
Rincian Output	:	01	ABF.007	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	24.000.000
		02	ABF.008	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	123.799.000
		03	ABF.009	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	144.276.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7660.BMA	Data dan Informasi Publik	1,00	dokumen, Peta, Data	48.595.000
Rincian Output	:	01	BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1,00	dokumen	48.595.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	17.400.000
Rincian Output	:	01	FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1,00	Laporan	17.400.000
Program	:	146.04.WA	Program Dukungan Manajemen			23.944.000	
Kegiatan	:	7675	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			23.944.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	23.944.000
Rincian Output	:	01	EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	14.366.000
		02	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	9.578.000

Jakarta, 01 Desember 2025
 a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

ttd.
 Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.
 197310261993021001

Gambar 2.3 DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Revisi ke 2 Tahun Anggaran 2026

D. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Target kinerja yang tertuang dalam DIPA Revisi ke 2 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menjadi dasar penetapan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Pada pelaksanaannya DIPA Ditjen Perkotaan telah mengalami dua kali revisi yaitu Revisi ke 1 pada tanggal 29 Desember 2025 dan DIPA Revisi ke 2 pada tanggal 13 Februari 2026. Sehubungan dengan hal tersebut Perjanjian Kinerja DIPA Ditjen Perkotaan telah mengalami satu kali revisi sehingga terdapat Perjanjian Kinerja Awal dan Perjanjian Kinerja Revisi ke 1, Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 inilah yang menjadi indikator kinerja dalam menjalankan target pada kegiatan BP3KP Kalimantan II pada DIPA Ditjen Perkotaan. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan target pada pelaksanaan kegiatan pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dapat berubah seiring dengan terjadinya perubahan target dan pagu anggaran dengan terbitnya DIPA Revisi yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Revisi selama tahun anggaran berjalan. Berikut adalah Target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Tabel 2.5 Target Kinerja BP3KP Kalimantan II TA 2026 DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target PK	Aktivitas	Target Capaian Triwulan I
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan				
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
SK 1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			
1	Jumlah Kebijakan, Strategi, dan Program Prioritas Penyelenggaraan perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan	10,45%
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	5 Laporan		10,45%
	Balai P3KP Kalimantan II	1 Layanan		10,45%
	Satker PKP Kaltim	1 Layanan		10,45%
	Satker PKP Kalsel	1 Layanan		10,45%
	Satker PKP Kaltara	1 Layanan		10,45%
	Satker PKP IKN	1 Layanan		10,45%
SK 2	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan			
1	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan	10,45%
SK 3	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan	10,45%
SK 4	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan			
1	Jumlah Unit Rumah Susun ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	44 Unit	Tw I – Perencanaan dan Persiapan	10,45%
	Satker PKP Kalsel	44 Unit		10,45%
2	Jumlah Unit Rumah Susun MBR/Pekerja Perumahan	65 Unit		10,45%
	Satker PKP Kaltim	65 Unit		10,45%
3	Jumlah Unit Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	240 Unit		10,45%
	Satker PKP IKN	240 Unit		10,45
4	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan		10,45%
SK 5	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan			
1	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	2100 Unit	Tw I – Perencanaan dan Persiapan	10,45%
	Satker PKP Kaltim	900 Unit		10,45%

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target PK	Aktivitas	Target Capaian Triwulan I
	Satker PKP Kalsel	600 Unit		10,45%
	Satker PKP Kaltara	600 Unit		10,45%
2	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan		10,45%
Program Dukungan Manajemen				
SK 1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan			
1	Jumlah Layanan BMN dan Manajemen Keuangan	1 Layanan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan	10,45%
2	Jumlah Layanan Umum	5 Layanan		10,45%
	Balai P3KP Kalimantan II	1 Layanan		10,45%
	Satker PKP Kaltim	1 Layanan		10,45%
	Satker PKP Kalsel	1 Layanan		10,45%
	Satker PKP Kaltara	1 Layanan		10,45%
	Satker PKP IKN	1 Layanan		10,45%
3	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan		10,45%
KEGIATAN		PAGU APBN		
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II		Rp 375.415.000,00	
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur		Rp 101.945.596.000,00	
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan		Rp 37.150.504.000,00	
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara		Rp 12.866.534.000,00	
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara		Rp 51.814.768.000,00	
TOTAL			Rp 204.152.817.000,00	

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Adapaun target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan disusun berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 2 Tanggal 13 Februari 2026 untuk pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691574/2026**



DS 9043-8220-9895-7508

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (146) | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. Unit Organisasi | : | (05) | DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN |
| 3. Provinsi | : | (16) | KALIMANTAN TIMUR |
| 4. Kode/Nama Satker | : | (691574) | Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II |
| Sebesar | : | Rp. 375.415.000 | (TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA EMPAT RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsional :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	375.415.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
6. SBSN PBS	Rp.			Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SAMARINDA (046) Rp. 375.415.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dan pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691574/2026
I A. INFORMASI KINERJA**



DS 9043-8220-9895-7508

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR

Kode/Nama Satker : (691574) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I A. 1

Program	:	146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			331.163.000
Kegiatan	:	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			331.163.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perkotaan			
		2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perkotaan			
		3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perkotaan			
		4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan			
		5. 05	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen (Rekomendasi Kebijakan)			
Klasifikasi Rincian Output	1 :	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan	270.242.000
Rincian Output	:	01	ABF.001 Kebijakan, Kamitran, Strategi dan Program Prioritas	1,00	Rekomendasi Kebijakan	63.184.000
		02	ABF.002 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	41.584.000
		03	ABF.003 Kebijakan Penyelenggaraan Penyediaan Lahan, Perizinan dan Penghutan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	45.292.000
		04	ABF.004 Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	65.091.000
		05	ABF.005 Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	55.091.000
Klasifikasi Rincian Output	2 :	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	60.921.000
Rincian Output	:	01	FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00	Laporan	60.921.000
Program	:	146.05.WA	Program Dukungan Manajemen			44.252.000
Kegiatan	:	7676	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			44.252.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691574/2026
I A. INFORMASI KINERJA


DS 9043-6226-9895-7508

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
 Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
 Kode/Nama Satker : (691574) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	1	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	44.252.000
Rincian Output		01	EBA.962 Layanan Umum	1,00	Layanan	14.851.000
		02	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	14.163.000
		03	EBA.206 Layanan BMN	1,00	Layanan	15.238.000

Jakarta, 01 Desember 2025
 A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
 ttd.
 SRI HARYATI
 197107071997032004

Gambar 2.4 DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Revisi ke 2
Tahun Anggaran 2026

E. DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Target kinerja yang tertuang dalam DIPA Revisi ke 1 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menjadi dasar penetapan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, dan pada pelaksanaannya Perjanjian Kinerja Awal ini menjadi indikator kinerja dalam menjalankan target pada kegiatan BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan target pada pelaksanaan kegiatan pada DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dapat berubah seiring dengan terjadinya perubahan target dan pagu anggaran dengan terbitnya DIPA Revisi yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Revisi. Berikut adalah Target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Tabel 2.6 Target Kinerja BP3KP Kalimantan II TA 2026 DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja	Target PK	Aktivitas	Target Capaian Triwulan I
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target PK	Aktivitas	Target Capaian Triwulan I
SK 1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan	10,45%
SK 2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	2 Rekomendasi Kebijakan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan	10,45%
SK 3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman			
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	1 Laporan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan	10,45%
KEGIATAN			PAGU APBN	
1	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman		Rp 170.115.000,00	
TOTAL			Rp 170.115.000,00	

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Adapaun target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko disusun berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 1 Tanggal 29 Desember 2025 untuk pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691607/2026



DS:1733-0741-6800-0152

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (06)	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Provinsi	: (16)	KALIMANTAN TIMUR
4. Kode/Nama Sater	: (691607)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar	: Rp. 170.115.000	(SERATUS TUJUH PULUH JUTA SERATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.06.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

146.06.1A.7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

C. Sumber Dana Berasal Dari :		Rp.		Jumlah Uang	
1. Rupiah Murni	Rp.	170.115.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
6. SDBN PBS	Rp.	0		Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SAMARINDA (046) Rp. 170.115.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025

A.N. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.

LUKY ALFIRMAN

NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691607/2026
I A. INFORMASI KINERJA


DS.1733-0/41-5830-0152

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode/Nama Salkes : (691607) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I A. 1

Program	: 146.06.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				170.115.000
Kegiatan	: 7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman				170.115.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output	1 : 7662.ABF	Kebijakan Bidang Serana dan Prasarana	3,00	Rekomendasi Kebijakan		132.800.000
Rincian Output	: 01 ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1,00	Rekomendasi Kebijakan		33.707.000
	: 02 ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	2,00	Rekomendasi Kebijakan		99.093.000
Klasifikasi Rincian Output	2 : 7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan		37.315.000
Rincian Output	: 01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	1,00	Laporan		37.315.000

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
td.
AZIS ANDRIANSYAH
NRP. 77050672

Gambar 2.5 DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Revisi ke 1 Tahun Anggaran 2026

2.2 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Renstra

Metode Pengukuran Kinerja Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 memuat hasil pengukuran capaian kinerja yang dilaksanakan dengan mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra serta selaras dengan target nasional yang ditetapkan oleh masing-masing unit organisasi. Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi maupun kontribusinya terhadap pencapaian target pembangunan nasional. Melalui pengukuran kinerja berdasarkan Renstra, dapat dilakukan evaluasi terhadap efektivitas dan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar dalam penyusunan langkah perbaikan dan tindak lanjut guna meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Berikut adalah pengukuran kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Renstra.

Tabel 2.7 Metode Pengukuran Kinerja Berdasarkan Renstra

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra Tahun 2026	Anggaran Renstra Tahun 2026 (Rp Ribu)	Target Pada DIPA Efektif	Pagu Pada DIPA Efektif	Capaian Pada TW I (Rp Ribu)	Persentase Capaian Terhadap Target Renstra (%)	Keterangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10		
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan											
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:											
1	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi										
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak											
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi											
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II											
	OUTPUT KEGIATAN:										
	DIPA Ditjen KP	PBF.001	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	175.000	1	116.752	25.044	14,31%	
		BMA.001	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen	1	60.000	1	36.910	14.605	24,34%	
			Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	Laporan	-	-	-	-	-	-	Tidak tercantum dalam DIPA efektif
			Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan	1	32.632	-	-	-	-	Tidak tercantum dalam DIPA efektif

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra Tahun 2026	Anggaran Renstra Tahun 2026 (Rp Ribu)	Target Pada DIPA Efektif	Pagu Pada DIPA Efektif	Capaian Pada TW I (Rp Ribu)	Persentase Capaian Terhadap Target Renstra (%)	Keterangan
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	DIPA Ditjen Perdesaan	PEA.001	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	Tidak tercantum dalam DIPA efektif
		ABF.009	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1.168.686	1	144.276	26.623	2,28%	
		BMA.001	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen	1	452.253	1	48.595	0	0	
		FAE.001	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	4	1.551.126	3	187.111	47.875	3,09%	
		a	BP3KP Kalimantan II	Laporan	1	727.485	-	-	-	-	Tidak tercantum dalam DIPA efektif
		b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Laporan	1	233.805	1	60.500	22.690	9,70%	
		c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Laporan	1	280.842	1	60.231	14.733	5,25%	
		d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Laporan	1	308.994	1	66.380	10.452	3,38%	
	DIPA Ditjen Perkotaan	ABF.001	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	190.000	1	63.184	12.267	6,46%	
		FAE.001	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	5	445.000	5	170.045	49.356	29%	
		a	BP3KP Kalimantan II	Laporan	1	155.000	1	60.921	7.391	4,77%	

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra Tahun 2026	Anggaran Renstra Tahun 2026 (Rp Ribu)	Target Pada DIPA Efektif	Pagu Pada DIPA Efektif	Capaian Pada TW I (Rp Ribu)	Persentase Capaian Terhadap Target Renstra (%)	Keterangan
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
			b Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Laporan	1	75.000	1	25.997	13.530	18,04%	
			c Satker Provinsi Kalimantan Timur	Laporan	1	70.000	1	27.023	13.335	19,05%	
			d Satker Provinsi Kalimantan Utara	Laporan	1	70.000	1	27.625	15.100	21,57%	
			e Satker IKN	Laporan	1	75.000	1	28.479	0	0,00%	
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum											
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II											
OUTPUT KEGIATAN:											
	DIPA Ditjen KP	RBB.001	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	915	13.411.095	60	1.340.200	1.200	0,01%	
		a	Kalimantan Selatan	Unit	682	9.996.029	60	1.340.200	1.200	0,01%	
		b	Kalimantan Timur	Unit	181	2.652.905	-	-	-	-	Tidak tercantum dalam DIPA efektif
		c	Kalimantan Utara	Unit	52	762.161	-	-	-	-	Tidak tercantum dalam DIPA efektif
		CBR.001	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen	-	-	1	160.000	3.775	2,36%	Target Tahun 2026 tidak ditetapkan pada Renstra
	DIPA Ditjen Perdesaan	CBR.001	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen	1	2.899.352	-	-	-	-	Tidak tercantum dalam DIPA efektif

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra Tahun 2026	Anggaran Renstra Tahun 2026 (Rp Ribu)	Target Pada DIPA Efektif	Pagu Pada DIPA Efektif	Capaian Pada TW I (Rp Ribu)	Persentase Capaian Terhadap Target Renstra (%)	Keterangan
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
		CBR.001	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen	1	293.370	-	-	-	-	Tidak tercantum dalam DIPA efektif
	DIPA Ditjen Perkotaan	ABF.002	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	105.000	1	41.584	1.175	1,12%	
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni											
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni											
OUTPUT KEGIATAN:											
	DIPA Ditjen KP, Perdesaan, dan Perkotaan	RBB.008	Jumlah unit rumah swadaya	Unit	9.173	222.055.398	8.400	183.330.766	565.736	0,25%	
		a	Kalimantan Selatan	Unit	4.063	98.355.073	3.900	84.613.492	303.809	0,31%	
		b	Kalimantan Timur	Unit	3.170	76.737.775	3.000	65.867.674	253.607	0,33%	
		c	Kalimantan Utara	Unit	1.940	46.962.550	1.500	32.849.600	8.320	0,02%	
			Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	1.793	772.683.713	-	-	-	-	Tidak tercantum dalam DIPA efektif
		a	Kalimantan Selatan	Unit	239	102.995.765	-	-	-	-	
		b	Kalimantan Timur	Unit	775	333.982.085	-	-	-	-	
		c	Kalimantan Utara	Unit	779	335.705.863	-	-	-	-	
	DIPA Ditjen Perkotaan		Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	220	414.155.460	349	158.351.701	28.684.872	6,93%	
		RBB.003	Kalimantan Selatan	Unit	88	165.662.184	44	24.152.295	4.966.097	3,00%	
		RBB.004	Kalimantan Timur	Unit	44	82.831.092	65	82.422.369	16.567.938	20,00%	

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	Target Renstra Tahun 2026	Anggaran Renstra Tahun 2026 (Rp Ribu)	Target Pada DIPA Efektif	Pagu Pada DIPA Efektif	Capaian Pada TW I (Rp Ribu)	Persentase Capaian Terhadap Target Renstra (%)	Keterangan
-1			-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
				Kalimantan Utara	Unit	44	82.831.092	-	-	-	-	Tidak tercantum dalam DIPA efektif
			RBB.007	IKN	Unit	44	82.831.092	240	51.777.037	7.150.837	8,63%	
	DIPA Ditjen KP	CBR.002	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Dokumen	1	88.500	1	115.467	45.686	51,62%	
			Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh		Laporan	-	-	-	-	-	-	Tidak tercantum dalam DIPA efektif
			a	BP3KP Kalimantan II	Laporan	-	-	-	-	-	-	
			b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Laporan	-	-	-	-	-	-	
			c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Laporan	-	-	-	-	-	-	
			d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Laporan	-	-	-	-	-	-	
			e	Satker IKN	Laporan	-	-	-	-	-	-	
	DIPA Ditjen Perdesaan	FAE.004	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan		Laporan	1	482.511	1	17.400	0	0,00%	
		ABF.007	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan		Rekomendasi Kebijakan	1	246.000	1	24.000	4.830	1,96%	
		ABF.008	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan		Rekomendasi Kebijakan	1	1.920.000	1	123.799	32.969	1,72%	

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra Tahun 2026	Anggaran Renstra Tahun 2026 (Rp Ribu)	Target Pada DIPA Efektif	Pagu Pada DIPA Efektif	Capaian Pada TW I (Rp Ribu)	Persentase Capaian Terhadap Target Renstra (%)	Keterangan
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
			Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	-	-	-	-	-	-	Tidak tercantum dalam DIPA efektif
		a	BP3KP Kalimantan II	Laporan	-	-	-	-	-	-	
		b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Laporan	-	-	-	-	-	-	
		c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Laporan	-	-	-	-	-	-	
		d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Laporan	-	-	-	-	-	-	
		e	Satker IKN	Laporan	-	-	-	-	-	-	
	DIPA Ditjen Perkotaan	ABF.004	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	120.000	1	65.091	13.197	11,00%	
		ABF.005	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	2.582.700	1	55.091	15.414	0,60%	
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan											
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan											
OUTPUT KEGIATAN:											
	DIPA Ditjen Perkotaan	ABF.003	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	85.000	1	45.292	19.312	22,72%	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	Target Renstra Tahun 2026	Anggaran Renstra Tahun 2026 (Rp Ribu)	Target Pada DIPA Efektif	Pagu Pada DIPA Efektif	Capaian Pada TW I (Rp Ribu)	Persentase Capaian Terhadap Target Renstra (%)	Keterangan
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS										
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu									
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh										
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh										
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu										
	OUTPUT KEGIATAN:									
			Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	15,00	31.575.000	-	-	-	Tidak tercantum dalam DIPA efektif
		RBB.003	Kalimantan Selatan	Hektar	-	-	-	-	-	
		RBB.004	Kalimantan Timur	Hektar	-	-	-	-	-	
		RBB.007	Kalimantan Utara	Hektar	15,00	31.575.000	-	-	-	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS										
3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan									
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman										
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman										
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman										
	OUTPUT KEGIATAN:									

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra Tahun 2026	Anggaran Renstra Tahun 2026 (Rp Ribu)	Target Pada DIPA Efektif	Pagu Pada DIPA Efektif	Capaian Pada TW I (Rp Ribu)	Persentase Capaian Terhadap Target Renstra (%)	Keterangan
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	DIPA Ditjen TKPR	F AE.001	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	1	52.600	1	37.315	9.766	18,57%	
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel											
	OUTPUT KEGIATAN:										
	DIPA Ditjen TKPR	ABF.004	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	1	182.150	1	33.707	7.643	4,20%	
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman											
	OUTPUT KEGIATAN:										
	DIPA Ditjen TKPR	ABF.005	Jumlah penerapan manajemen risiko	Rekomendasi Kebijakan	1	225.000	1	49.547	0	0%	
		ABF.005	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Rekomendasi Kebijakan	1	225.000	1	49.547	0	0%	
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman											
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS											
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman										
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II											
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II											

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra Tahun 2026	Anggaran Renstra Tahun 2026 (Rp Ribu)	Target Pada DIPA Efektif	Pagu Pada DIPA Efektif	Capaian Pada TW I (Rp Ribu)	Persentase Capaian Terhadap Target Renstra (%)	Keterangan
-1		-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II										
OUTPUT KEGIATAN:										
DIPA Sekjen	EBA.994	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	5	109.713.909	5	3.934.533	737.148	0,67%	
	a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	32.576.119	1	1.078.262	190.759	0,59%	
	b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Layanan	1	19.361.278	1	614.935	200.357	1,03%	
	c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Layanan	1	25.354.055	1	502.360	260.693	1,03%	
	d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Layanan	1	15.980.737	1	697.992	15.257	0,10%	
	e	Satker IKN	Layanan	1	16.441.720	1	1.040.984	70.082	0,43%	
	EBA.962	Jumlah Layanan Umum	Layanan	5	214.200	5	161.042	90.853	42,42%	
	a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	63.600	1	49.208	47.156	74,14%	
	b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Layanan	1	37.800	1	38.202	31.279	82,75%	
	c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Layanan	1	49.500	1	24.784	4.615	9,32%	
	d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Layanan	1	31.200	1	24.051	7.804	25,01%	
	e	Satker IKN	Layanan	1	32.100	1	24.797	0	0,00%	
	EBA.951	Jumlah Layanan Sarana Internal	Layanan	5	999.248	5	370.678	14.217	1,42%	
	a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	296.695	1	185.339	14.217	4,79%	
	b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Layanan	1	176.338	1	46.335	0	0,00%	
	c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Layanan	1	230.919	1	46.335	0	0,00%	
	d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Layanan	1	145.549	1	46.334	0	0,00%	
	e	Satker IKN	Layanan	1	149.747	1	46.335	0	0,00%	

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra Tahun 2026	Anggaran Renstra Tahun 2026 (Rp Ribu)	Target Pada DIPA Efektif	Pagu Pada DIPA Efektif	Capaian Pada TW I (Rp Ribu)	Persentase Capaian Terhadap Target Renstra (%)	Keterangan
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
DIPA Ditjen KP	EBA.962		Jumlah Layanan Umum	Layanan	5	464.000	5	232.860	11.749	2,53%	
		a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	104.000	1	59.574	10.299	9,90%	
		b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Layanan	1	71.000	1	24.637	0	0,00%	
		c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Layanan	1	103.000	1	47.757	0	0,00%	
		d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Layanan	1	85.000	1	45.471	1.450	1,71%	
		e	Satker IKN	Layanan	1	101.000	1	55.421	0	0,00%	
	EBA.963		Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	28.500	1	15.342	7.140	25,05%	
		a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	28.500	1	15.342	7.140	25,05%	
	EBA.Z06		Jumlah Layanan BMN	Layanan	1	27.000	1	27.000	1.994	7,39%	
		a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	27.000	1	27.000	1.994	7,39%	
DIPA Ditjen Perdesaan	EBA.962		Jumlah Layanan Umum	Layanan	4	477.000	4	65.618	0	0,00%	
		a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	139.500	1	14.366	0	0,00%	
		b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Layanan	1	112.500	1	28.380	0	0,00%	
		c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Layanan	1	112.500	1	15.372	0	0,00%	
		d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Layanan	1	112.500	1	7.500	0	0,00%	
	EBA.963		Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	14.131	1	9.578	0	0,00%	
		a.	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	14.131	1	9.578	0	0,00%	
DIPA Ditjen Perkotaan	EBA.962		Jumlah Layanan Umum	Layanan	5	415.000	5	67.428	0	0,00%	
		a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	125.000	1	14.851	0	0,00%	
		b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Layanan	1	70.000	1	12.280	0	0,00%	
		c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Layanan	1	75.000	1	13.440	0	0,00%	

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra Tahun 2026	Anggaran Renstra Tahun 2026 (Rp Ribu)	Target Pada DIPA Efektif	Pagu Pada DIPA Efektif	Capaian Pada TW I (Rp Ribu)	Persentase Capaian Terhadap Target Renstra (%)	Keterangan
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
			d Satker Provinsi Kalimantan Utara	Layanan	1	70.000	1	12.605	0	0,00%	
			e Satker IKN	Layanan	1	75.000	1	14.252	0	0,00%	
		EBA.963	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	1	85.000	1	14.163	1.290	1,52%	
			a. BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	85.000	1	14.163	1.290	1,52%	
		EBA.Z06	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	1	85.000	1	15.238	0	0,00%	
			a. BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	85.000	1	15.238	0	0,00%	
			Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	5	500.000	-	-	-	-	Tidak tercantum dalam DIPA efektif
			a BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	100.000	-	-	-	-	
			b Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Layanan	1	100.000	-	-	-	-	
			c Satker Provinsi Kalimantan Timur	Layanan	1	100.000	-	-	-	-	
			d Satker Provinsi Kalimantan Utara	Layanan	1	100.000	-	-	-	-	
			e Satker IKN	Layanan	1	100.000	-	-	-	-	

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2026

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terdapat beberapa kegiatan yang tidak tercantum dalam Target yang telah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis. Namun demikian, secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan pada BP3KP Kalimantan II telah berjalan sesuai dengan target perencanaan yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan BP3KP Kalimantan II dapat dinyatakan telah selaras dan mendukung pencapaian target nasional yang ditetapkan oleh unit organisasi terkait.

2.3 Capaian Target Triwulan

Analisis capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II Tahun Anggaran 2026 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja secara kumulatif sepanjang tahun 2026 yang dibagi per triwulanan. Pada dokumen ini capaian target yang dimaksud menggambarkan capaian kinerja khususnya pada Triwulan I terhadap target yang tertuang pada Perjanjian Kinerja maupun terhadap target yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Tahun 2026. Capaian target meliputi capaian kinerja program dan capaian kinerja kegiatan yang merujuk pada target yang tertuang pada Perjanjian Kinerja terakhir dalam triwulan I, sehingga Pagu yang tertera pada tabel capaian merupakan pagu yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja terakhir Triwulan I.

2.3.1 Capaian Target Triwulan I DIPA Sekretariat Jenderal

Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan I pada Triwulan I DIPA Sekretariat Jenderal, merujuk pada Perjanjian Kinerja Awal tanggal 10 April 2026. Untuk Kegiatan Layanan Umum, Layanan Perkantoran, dan Layanan Sarana Internal, Capaian Kinerja Kegiatan pada BP3KP Kalimantan II melingkupi capaian kinerja satker di bawahnya, yaitu Satker PKP Provinsi Kalimantan Timur, Satker PKP Provinsi Kalimantan Selatan, Satker PKP Provinsi Kalimantan Utara, dan Satker PKP IKN.

Tabel 2.8 Capaian Kinerja Triwulan I BP3KP Kalimantan II DIPA Sekretariat Jenderal

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Capaian Triwulan I		
						Keu (Ribu Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Sekretariat Jenderal								
Program Dukungan Manajemen								
1	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal			4.466.253	856.435	19,18%	20,56%
2	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)		Layanan	4.095.575	842.218	20,56%	35,84%
3	7665.EBA.962	Layanan Umum	5	Layanan	161.042	90.853	56,42%	46,16%
		Satker PKP Balai	1	Layanan	49.208	47.156	95,83%	97,87%
		Satker PKP Kaltim	1	Layanan	24.784	4.615	18,62%	18,62%
		Satker PKP Kalsel	1	Layanan	38.202	31.279	81,88%	81,88%
		Satker PKP Kaltara	1	Layanan	24.051	7.804	32,45%	32,45%
		Satker PKP IKN	1	Layanan	24.797	0	0,00%	0,00%
4	7665.EBA.994	Layanan Perkantoran	5	Layanan	3.934.533	737.148	18,74%	25,52%
		Satker PKP Balai	1	Layanan	1.078.262	190.759	17,69%	19,73%
		Satker PKP Kaltim	1	Layanan	502.360	260.693	51,89%	51,89%
		Satker PKP Kalsel	1	Layanan	614.935	200.357	32,58%	32,58%
		Satker PKP Kaltara	1	Layanan	697.992	15.257	2,19%	16,67%
		Satker PKP IKN	1	Layanan	1.040.984	70.082	6,73%	6,73%
5	7665.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)		Layanan	370.678	14.217	3,84%	5,28%
6	7665.EBB.951	Layanan Sarana Internal	21	Unit	370.678	14.217	3,84%	5,28%

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Capaian Triwulan I		
						Keu (Ribu Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
		Satker PKP Balai	1	Unit	185.339	14.217	7,67%	9,71%
		Satker PKP Kaltim	1	Unit	46.335	0	0,00%	0,00%
		Satker PKP Kalsel	10	Unit	46.335	0	0,00%	0,00%
		Satker PKP Kaltara	1	Unit	46.334	0	0,00%	16,67%
		Satker PKP IKN	8	Unit	46.335	0	0,00%	0,00%

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Sekretariat Jenderal; Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2026 pada website <https://my.pkp.go.id/>

Tabel 2.9 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I BP3KP Kalimantan II DIPA Sekretariat Jenderal terhadap Target Rencana Aksi Kinerja TA 2026

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Target Capaian TW-I Berdasarkan Renaksi BP3KP Kalimantan II Tahun 2026	Capaian TW-I TA 2026		Selisih Capaian	
				Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik
A	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	10,45%	19,18%	20,56%	8,73%	10,11%
1	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	10,45%	20,56%	35,84%	10,11%	25,39%
2	7665.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	10,45%	3,84%	5,28%	-6,61%	-5,17%

Sumber: Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2026 pada website <https://my.pkp.go.id/>; Dokumen Rencana Aksi Kinerja BP3KP Kalimantan II TA 2026; Hasil Analisis Tahun 2026

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja, pada Triwulan I BP3KP menunjukkan realisasi kinerja yang telah memenuhi target yang direncanakan. Realisasi tersebut bahkan mencatat surplus capaian sebesar **8,73% pada aspek keuangan** dan **10,11% pada aspek capaian fisik**. Dengan demikian, diharapkan kinerja tersebut dapat terus dipertahankan serta dioptimalkan guna memastikan pencapaian target kinerja dapat terealisasi secara maksimal hingga akhir tahun anggaran.

2.3.2 Capaian Target Triwulan I DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan I pada Triwulan I DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, merujuk pada Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 tanggal 30 Maret 2026. Terdapat beberapa Capaian Kinerja Kegiatan pada BP3KP Kalimantan II yang melingkupi capaian kinerja satker di bawahnya, yaitu Satker PKP Provinsi Kalimantan Timur, Satker PKP Provinsi Kalimantan Selatan, Satker PKP Provinsi Kalimantan Utara, dan Satker PKP IKN. Berikut adalah Capaian Target Kinerja Triwulan I DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2026.

Tabel 2.10 Capaian Kinerja Triwulan I BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal
Kawasan Permukiman

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Capaian Triwulan I		
						Keu (Ribu Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman								
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman								
1	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman			21.362.054	157.909	0,74%	22,09%
2	7659.BMA	Data dan Informasi Publik		Dokumen	36.910	14.605	39,57%	41,63%
3	7659.BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1	Dokumen	36.910	14.605	39,57%	41,63%
		Satker PKP Balai	1	Dokumen	36.910	14.605	39,57%	41,63%
4	7659.CBR	Dukungan Teknis (Dokumen)		Dokumen	275.467	49.461	17,96%	23,03%
5	7659.CBR.001	Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Fasilitas PSU	1	Dokumen	160.000	3.775	2,36%	4,42%
		Satker PKP Balai	1	Dokumen	160.000	3.775	2,36%	4,42%
6	7659.CBR.002	Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1	Dokumen	115.467	45.686	39,57%	41,63%
		Satker PKP Balai	1	Dokumen	115.467	45.686	39,57%	41,63%
7	7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan, Kajian) [PN]		Rekomendasi Kebijakan	116.752	25.044	21,45%	23,51%
8	7659.PBF.001	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Rekomendasi Kebijakan	116.752	25.044	21,45%	23,51%
		Satker PKP Balai	1	Rekomendasi Kebijakan	116.752	25.044	21,45%	23,51%
9	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (unit, Hektar) [PN]		Unit	20.932.925	68.800	0,33%	0,19%
10	7659.RBB.001	Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	60	Unit	1.340.200	1.200	0,09%	0,11%
		Satker PKP Kalsel	60	Unit	1.340.200	1.200	0,09%	0,11%
11	7659.RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	900	Unit	19.592.725	67.600	0,35%	0,26%
		Satker PKP Kaltim	300	Unit	6.707.727	0	0,00%	0,00%
		Satker PKP Kalsel	600	Unit	12.884.998	67.600	0,52%	0,52%
Program Dukungan Manajemen								
12	7674	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman			275.202	20.883	7,59%	21,75%

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Capaian Triwulan I		
						Keu (Ribu Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
13	7674.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)		Layanan	275.202	20.883	7,59%	21,75%
14	7674.EBA.962	Layanan Umum	5	Layanan	232.860	11.749	5,05%	7,20%
		Satker PKP Balai	1	Layanan	59.574	10.299	17,29%	19,35%
		Satker PKP Kaltim	1	Layanan	47.757	0	0,00%	0,00%
		Satker PKP Kalsel	1	Layanan	24.637	0	0,00%	0,00%
		Satker PKP Kaltara	1	Layanan	45.471	1.450	3,19%	16,67%
		Satker PKP IKN	1	Layanan	55.421	0	0,00%	0,00%
15	7674.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	15.342	7.140	46,54%	48,60%
		Satker PKP Balai	1	Layanan	15.342	7.140	46,54%	48,60%
16	7674.EBA.Z06	Layanan BMN	1	Layanan	27.000	1.994	7,39%	9,45%
		Satker PKP Balai	1	Layanan	27.000	1.994	7,39%	9,45%

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman; Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2026 pada website <https://my.pkp.go.id/>

Tabel 2.11 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman terhadap Target Rencana Aksi Kinerja TA 2026

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Target Capaian TW-I Berdasarkan Renaksi BP3KP Kalimantan II Tahun 2026	Capaian TW-I TA 2026		Selisih Capaian	
				Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik
B	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	10,45%	0,74%	22,09%	-9,71%	11,64%
1	7659.BMA	Data dan Informasi Publik	10,45%	39,57%	41,63%	29,12%	31,18%
2	7659.CBR	Dukungan Teknis (Dokumen)	10,45%	17,96%	23,03%	7,51%	12,58%
3	7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan, Kajian) [PN]	10,45%	21,45%	23,51%	11,00%	13,06%
4	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman (unit, Hektar) [PN]	10,45%	0,33%	0,19%	-10,12%	-10,27%
C	7674	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	10,45%	7,59%	21,75%	-2,86%	11,30%
1	7674.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	10,45%	7,59%	21,75%	-2,86%	11,30%

Sumber: Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2026 pada website <https://my.pkp.go.id/>; Dokumen Rencana Aksi Kinerja BP3KP Kalimantan II TA 2026; Hasil Analisis Tahun 2026

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja, pada Triwulan I BP3KP menunjukkan realisasi kinerja yang telah memenuhi target yang direncanakan. Realisasi tersebut bahkan mencatat **surplus** capaian sebesar **11,64% pada aspek fisik pada Program Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman** dan surplus sebesar **11,30% pada aspek fisik Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman**, namun pada aspek keuangan masih diperlukan peningkatan dalam realisasinya dimana

tercatat selisih **(-9,71%)** pada aspek capaian keuangan Program Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman dan selisih **(-2,86%)** pada aspek capaian keuangan Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman. Dengan demikian, diharapkan kinerja tersebut dapat terus ditingkatkan serta dioptimalkan guna memastikan pencapaian target kinerja dapat terealisasi secara maksimal hingga akhir tahun anggaran.

2.3.3 Capaian Target Triwulan I DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan I pada Triwulan I DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, merujuk pada Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 tanggal 30 Maret 2026. Terdapat beberapa Capaian Kinerja Kegiatan pada BP3KP Kalimantan II yang melingkupi capaian kinerja satker di bawahnya, yaitu Satker PKP Provinsi Kalimantan Timur, Satker PKP Provinsi Kalimantan Selatan, Satker PKP Provinsi Kalimantan Utara, dan Satker PKP IKN. Berikut adalah Capaian Target Kinerja Triwulan I DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun Anggaran 2026.

Tabel 2.12 Capaian Kinerja Triwulan I BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Capaian Triwulan I		
						Keu (Ribu Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan								
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman								
1	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			119.014.222	509.210	0,43%	12,61%
2	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)		Rekomendasi Kebijakan	292.075	64.422	22,06%	23,77%
3	7660.ABF.007	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1	Rekomendasi Kebijakan	24.000	4.830	20,13%	22,16%
		Satker PKP Balai	1	Rekomendasi Kebijakan	24.000	4.830	20,13%	22,16%
4	7660.ABF.008	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1	Rekomendasi Kebijakan	123.799	32.969	26,63%	28,66%
		Satker PKP Balai	1	Rekomendasi Kebijakan	123.799	32.969	26,63%	28,66%
5	7660.ABF.009	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Rekomendasi Kebijakan	144276	26.623	18,45%	20,48%
		Satker PKP Balai	1	Rekomendasi Kebijakan	144.276	26.623	18,45%	20,48%
6	7660.BMA	Data dan Informasi Publik (dokumen, Peta, Data)		Dokumen	48.595	0	0,00%	0,00%

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Capaian Triwulan I		
						Keu (Ribu Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
7	7660.BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Dokumen	48.595	0	0,00%	0,00%
		Satker PKP Balai	1	Dokumen	48.595	0	0,00%	0,00%
8	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)		Laporan	204.511	47.875	23,41%	26,38%
9	7660.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3	Laporan	187.111	47.875	25,59%	26,38%
		Satker PKP Kaltim	1	Laporan	60.231	14.733	24,46%	24,46%
		Satker PKP Kalsel	1	Laporan	60.500	22.690	37,50%	38,00%
		Satker PKP Kaltara	1	Laporan	66.380	10.452	15,74%	16,67%
10	7660.FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1	Laporan	17.400	0	0,00%	0,00%
		Satker PKP Balai	1	Laporan	17.400	0	0,00%	0,00%
11	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (unit, Hektar) [PN]		Unit	118.469.041	396.914	0,34%	0,29%
12	7660.RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	5400	Unit	118.469.041	396.914	0,34%	0,29%
		Satker PKP Kaltim	1800	Unit	39.677.183	168.285	0,42%	0,42%
		Satker PKP Kalsel	2700	Unit	58.768.562	220.309	0,37%	0,41%
		Satker PKP Kaltara	900	Unit	20.023.296	8.320	0,04%	0,05%
Program Dukungan Manajemen								
13	7675	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			75.196	0	0,00%	2,08%
14	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)		Layanan	75.196	0	0,00%	2,08%
15	7675.EBA.962	Layanan Umum	4	Layanan	65.618	0	0,00%	4,17%
		Satker PKP Balai	1	Layanan	14.366	0	0,00%	0,00%
		Satker PKP Kaltim	1	Layanan	15.372	0	0,00%	0,00%
		Satker PKP Kalsel	1	Layanan	28.380	0	0,00%	0,00%
		Satker PKP Kaltara	1	Layanan	7.500	0	0,00%	16,67%
16	7675.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	9.578	0	0,00%	0,00%
		Satker PKP Balai	1	Layanan	9.578	0	0,00%	0,00%

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan; Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2026 pada website <https://my.pkp.go.id/>

Tabel 2.13 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan terhadap Target Rencana Aksi Kinerja TA 2026

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Target Capaian TW-I Berdasarkan Renaksi BP3KP Kalimantan II Tahun 2026	Capaian TW-I TA 2026		Selisih Capaian	
				Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik
D	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	10,45%	0,43%	12,61%	-10,02%	2,16%
1	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	10,45%	22,06%	23,77%	11,61%	13,32%
2	7660.BM A	Data dan Informasi Publik (dokumen, Peta, Data)	10,45%	0,00%	0,00%	-10,45%	- 10,45%
3	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	10,45%	23,41%	26,38%	12,96%	15,93%
4	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (unit, Hektar) [PN]	10,45%	0,34%	0,29%	-10,11%	- 10,16%
E	7675	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	10,45%	0,00%	2,08%	-10,45%	-8,37%
1	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	10,45%	0,00%	2,08%	-10,45%	-8,37%

Sumber: Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2026 pada website <https://my.pkp.go.id/>; Dokumen Rencana Aksi Kinerja BP3KP Kalimantan II TA 2026; Hasil Analisis Tahun 2026

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja, pada Triwulan I BP3KP menunjukkan realisasi kinerja yang belum memenuhi target yang direncanakan. Pada tabel tersebut baik pada program Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan maupun program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan tidak terealisasi sesuai dengan target rencana. Tercatat bahwa realisasi mengalami selisih **(-10,02%)** pada **aspek keuangan** pada **Program Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan** dan surplus sebesar **2,16%** pada **aspek fisik**. Pada **Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan** tercatat selisih **(-10,45%)** pada **aspek keuangan** dan **(-8,73%)** pada **aspek fisik**. Dengan demikian, diharapkan kinerja tersebut dapat terus ditingkatkan serta dioptimalkan guna memastikan pencapaian target kinerja dapat terealisasi secara maksimal hingga akhir tahun anggaran.

2.3.4 Capaian Target Triwulan I DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan I pada Triwulan I DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, merujuk pada Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 tanggal 30 Maret 2026. Terdapat beberapa Capaian Kinerja Kegiatan pada BP3KP Kalimantan II yang melingkupi capaian kinerja satker di bawahnya, yaitu Satker PKP Provinsi Kalimantan Timur, Satker PKP Provinsi Kalimantan Selatan, Satker PKP Provinsi Kalimantan Utara, dan Satker PKP IKN. Berikut adalah Capaian Target Kinerja Triwulan I DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2026.

Tabel 2.14 Capaian Kinerja Triwulan I BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal
Perumahan Perkotaan

No	Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Capaian Triwulan I		
						Keu (Ribu Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan								
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman								
1	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			204.060.988	28.896.814	14,16%	27,97%
2	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)		Rekomendasi Kebijakan	270.242	61.365	22,71%	15,73%
3	7661.ABF.001	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	63.184	12.267	19,42%	21,46%
		Satker PKP Balai	1	Rekomendasi Kebijakan	63.184	12.267	19,42%	21,46%
4	7661.ABF.002	Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	41.584	1.175	2,83%	4,87%
		Satker PKP Balai	1	Rekomendasi Kebijakan	41.584	1.175	2,83%	4,87%
5	7661.ABF.003	Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	45.292	19.312	42,64%	0,00%
		Satker PKP Balai	1	Rekomendasi Kebijakan	45.292	19.312	42,64%	0,00%
6	7661.ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	65.091	13.197	20,27%	22,31%
		Satker PKP Balai	1	Rekomendasi Kebijakan	65.091	13.197	20,27%	22,31%
7	7661.ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	55.091	15.414	27,98%	30,02%
		Satker PKP Balai	1	Rekomendasi Kebijakan	55.091	15.414	27,98%	30,02%
8	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)		Laporan	170.045	49.356	29,03%	31,21%
9	7661.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	5	Laporan	170.045	49.356	29,03%	31,21%
		Satker PKP Balai	1	Laporan	60.921	7.391	12,13%	0,00%
		Satker PKP Kaltim	1	Laporan	27.023	13.335	49,35%	49,35%
		Satker PKP Kalsel	1	Laporan	25.997	13.530	52,04%	52,04%

No	Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Capaian Triwulan I		
						Keu (Ribu Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
		Satker PKP Kaltara	1	Laporan	27.625	15.100	54,66%	54,66%
		Satker PKP IKN	1	Laporan	28.479	0	0,00%	0,00%
10	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (unit, Hektar) [PN]		Unit	203.620.701	28.786.094	14,14%	36,97%
11	7661.RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	44	Unit	24.152.295	4.966.097	20,56%	33,22%
		Satker PKP Kalsel	44	Unit	24.152.295	4.966.097	20,56%	33,22%
12	7661.RBB.004	Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan	65	Unit	82.422.369	16.567.938	20,10%	20,10%
		Satker PKP Kaltim	65	Unit	82.422.369	16.567.938	20,10%	20,10%
13	7661.RBB.007	Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	240	Unit	51.777.037	7.150.837	13,81%	94,35%
		Satker PKP IKN	240	Unit	51.777.037	7.150.837	13,81%	94,35%
14	7661.RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	2100	Unit	45.269.000	101.222	0,22%	0,21%
		Satker PKP Kaltim	900	Unit	19.482.764	85.322	0,44%	0,44%
		Satker PKP Kalsel	600	Unit	12.959.932	15.900	0,12%	0,12%
		Satker PKP Kaltara	600	Unit	12.826.304	0	0,00%	0,07%
Program Dukungan Manajemen								
15	7676	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			96.829	1.290	1,33%	1,11%
16	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)		Layanan	96.829	1.290	1,33%	1,11%
17	7676.EBA.962	Layanan Umum	5	Layanan	67.428	0	0,00%	3,33%
		Satker PKP Balai	1	Layanan	14.851	0	0,00%	0,00%
		Satker PKP Kaltim	1	Layanan	13.440	0	0,00%	0,00%
		Satker PKP Kalsel	1	Layanan	12.280	0	0,00%	0,00%
		Satker PKP Kaltara	1	Layanan	12.605	0	0,00%	16,67%
		Satker PKP IKN	1	Layanan	14.252	0	0,00%	0,00%
18	7676.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	14.163	1.290	9,11%	0,00%
		Satker PKP Balai	1	Layanan	14.163	1.290	9,11%	0,00%
19	7676.EBA.Z06	Layanan BMN	1	Layanan	15.238	0	0,00%	0,00%
		Satker PKP Balai	1	Layanan	15.238	0	0,00%	0,00%

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan; Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2026 pada website <https://my.pkp.go.id/>

Tabel 2.15 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan terhadap Target Rencana Aksi Kinerja TA 2026

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Target Capaian TW-I Berdasarkan Renaksi BP3KP Kalimantan II Tahun 2026	Capaian TW-I TA 2026		Selisih Capaian	
				Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik
F	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	10,45%	14,16%	27,97%	3,71%	17,52%
1	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	10,45%	22,71%	27,97%	12,26%	17,52%
2	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	10,45%	29,03%	31,21%	18,58%	20,76%
3	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (unit, Hektar) [PN]	10,45%	14,14%	36,97%	3,69%	26,52%
G	7676	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	10,45%	1,33%	1,11%	-9,12%	-9,34%
1	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	10,45%	1,33%	1,11%	-9,12%	-9,34%

Sumber: Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2026 pada website <https://my.pkp.go.id/>; Dokumen Rencana Aksi Kinerja BP3KP Kalimantan II TA 2026; Hasil Analisis Tahun 2026

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja, pada Triwulan I BP3KP menunjukkan realisasi kinerja yang telah memenuhi target yang direncanakan. Pada program **Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan** mengalami surplus Realisasi terhadap Target Rencana yaitu sebesar **3,71% pada aspek keuangan** dan surplus **17,52% pada aspek fisik**. Namun, terdapat selisih pada **Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan** tercatat selisih **(-9,12%) pada aspek keuangan** dan selisih **(-9,34%) pada aspek fisik**. Dengan demikian, diharapkan kinerja tersebut dapat terus ditingkatkan serta dioptimalkan guna memastikan pencapaian target kinerja dapat terealisasi secara maksimal hingga akhir tahun anggaran.

2.3.5 Capaian Target Triwulan I DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan I pada Triwulan I DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, merujuk pada Perjanjian Kinerja Awal tanggal 28 Januari 2026. Berikut adalah Capaian Target Kinerja Triwulan I DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026.

Tabel 2.16 Capaian Kinerja Triwulan I BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Capaian Triwulan I		
						Keu (Ribu Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko								
Program Dukungan Manajemen								
1	7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman			170.115	17.409	10,23%	20,32%
2	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)		Rekomendasi Kebijakan	132.800	7.643	5,76%	12,38%
3	7662.ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1	Rekomendasi Kebijakan	33.707	7.643	22,67%	24,76%
		Satker PKP Balai	1	Rekomendasi Kebijakan	33.707	7.643	22,67%	24,76%
4	7662.ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	2	Rekomendasi Kebijakan	99.093	0	0,00%	0,00%
		Satker PKP Balai	2	Rekomendasi Kebijakan	99.093	0	0,00%	0,00%
5	7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)		Laporan	37.315	9.766	26,17%	28,26%
	7662.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	1	Laporan	37.315	9.766	26,17%	28,26%
		Satker PKP Balai	1	Laporan	37.315	9.766	26,17%	28,26%

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko; Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2026 pada website <https://my.pkp.go.id/>

Tabel 2.17 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko terhadap Target Rencana Aksi Kinerja TA 2026

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Target Capaian TW-I Berdasarkan Renaksi BP3KP Kalimantan II Tahun 2026	Capaian TW-I TA 2026		Selisih Capaian	
				Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik
H	7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	10,45%	10,23%	20,32%	-0,22%	9,87%
1	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	10,45%	5,76%	12,38%	-4,69%	1,93%
2	7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	10,45%	26,17%	28,26%	15,72%	17,81%

Sumber: Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2026 pada website <https://my.pkp.go.id/>; Dokumen Rencana Aksi Kinerja BP3KP Kalimantan II TA 2026; Hasil Analisis Tahun 2026

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja, pada Triwulan I BP3KP menunjukkan realisasi kinerja yang telah memenuhi target yang direncanakan pada **aspek fisik** yaitu dengan surplus **9,87%**. Namun, terdapat selisih pada **aspek keuangan** yaitu sebesar **(-0,22%)**. Dengan demikian, diharapkan kinerja tersebut dapat terus ditingkatkan serta dioptimalkan guna memastikan pencapaian target kinerja dapat terealisasi secara maksimal hingga akhir tahun anggaran.

2.4 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan selama periode Triwulan I, realisasi kinerja dan penyerapan anggaran belum sepenuhnya mencapai target yang telah direncanakan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan, baik dari aspek teknis maupun administratif, berikut adalah rincian permasalahan yang terjadi di BP3KP Kalimantan II dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan pada Dokumen Rencana Aksi Kinerja BP3KP Kalimantan II Tahun Anggaran 2026 maupun Dokumen Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II Tahun Anggaran 2026 dengan beberapa Unit Organisasi.

Tabel 2.18 Ringkasan Potensi dan Permasalahan serta Rencana Tindak Lanjut

Triwulan I			
No	Unit Organisasi	Potensi/Permasalahan Triwulan I	Rencana Tindak Lanjut (TW-II)
1	DIPA Sekretariat Jenderal	Potensi: Capaian kinerja menunjukkan realisasi kinerja telah memenuhi target yang direncanakan Permasalahan: Keterlambatan Penetapan Perjanjian Kinerja Awal maupun Revisi	- Diharapkan kinerja tersebut tetap terjaga dan dioptimalkan hingga akhir tahun anggaran. - Penyesuaian target kinerja sesuai perkembangan dan DIPA segera tertuang dalam Perjanjian kinerja
2	DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Potensi: Pada aspek fisik realisasi sudah melebihi target yang telah ditentukan Permasalahan: - Terdapat selisih minus pada realisasi capaian kinerja dalam aspek keuangan menunjukkan realisasi kinerja yang belum memenuhi target rencana - Keterlambatan Penetapan Perjanjian Kinerja Awal maupun Revisi	- Optimalisasi penyerapan anggaran. - Penyesuaian target kinerja sesuai perkembangan dan DIPA segera tertuang dalam Perjanjian Kinerja
3	DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Potensi: Pada aspek fisik realisasi sudah melebihi target yang telah ditentukan Permasalahan: - Terdapat selisih minus pada realisasi capaian kinerja dalam aspek keuangan menunjukkan realisasi kinerja yang belum memenuhi target rencana - Keterlambatan Penetapan Perjanjian Kinerja Awal maupun Revisi	- Optimalisasi penyerapan anggaran. - Penyesuaian target kinerja sesuai perkembangan dan DIPA segera tertuang dalam Perjanjian Kinerja
4	DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Potensi: Pada program Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan aspek keuangan dan fisik terealisasi melebihi target yang telah ditentukan	- Optimalisasi penyerapan anggaran. - Penyesuaian target kinerja sesuai perkembangan dan DIPA segera tertuang dalam Perjanjian Kinerja

Triwulan I			
No	Unit Organisasi	Potensi/Permasalahan Triwulan I	Rencana Tindak Lanjut (TW-II)
		Permasalahan: - Terdapat selisih minus pada realisasi capaian kinerja program dukungan manajemen baik dalam aspek fisik dan keuangan yang belum memenuhi target rencana - Keterlambatan Penetapan Perjanjian Kinerja Awal maupun Revisi	
5	DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Potensi: Pada aspek fisik realisasi sudah melebihi target yang telah ditentukan Permasalahan: Terdapat selisih minus pada realisasi capaian kinerja dalam aspek keuangan menunjukkan realisasi kinerja yang belum memenuhi target rencana	Optimalisasi penyerapan anggaran

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2026

BAB 3

Penutup

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kalimantan II

Tahun Anggaran
2026



BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan informasi yang disajikan selama periode Triwulan ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan masih dalam kendali yang ditentukan oleh target triwulanan walaupun terdapat selisih realisasi namun tidak terlalu jauh dari target, terdapat ada beberapa realisasi kinerja dan penyerapan anggaran belum sepenuhnya mencapai target yang telah direncanakan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari aspek teknis maupun administratif, termasuk adanya penyesuaian jadwal kegiatan dan optimalisasi sumber daya yang masih perlu ditingkatkan. Berikut adalah rincian target dan realisasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan BP3KP Kalimantan II yang mencakup pelaksanaan 5 (lima) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran:

Tabel 3.1 Perbandingan Rencana dan Realisasi Seluruh DIPA pada Triwulan I

No	Kegiatan	Pagu (Rp Ribu)	Rencana			Realisasi		
			Keu (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
1	DIPA Sekretariat Jenderal	4.466.253	466.723	10,45%	10,45%	856.435	19,18%	20,56%
2	DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	21.362.054	2.232.335	10,45%	10,45%	157.909	0,74%	22,09%
3	DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	119.014.222	12.436.986	10,45%	10,45%	509.210	0,43%	12,61%
4	DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	204.060.988	21.324.373	10,45%	10,45%	28.896.814	14,16%	27,97%
5	DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	170.115	17.777	10,45%	10,45%	17.409	10,23%	20,32%
Jumlah		349.073.632	36.478.195	10,45%	10,45%	30.437.777	8,95%	20,71%

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2026

Meskipun demikian, seluruh kegiatan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai serta perencanaan anggaran yang telah disusun. Hasil capaian pada Triwulan ini menjadi bahan evaluasi penting untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya, guna memastikan target kinerja dapat tercapai secara optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3.2 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I, diketahui bahwa seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Tidak ditemukan permasalahan yang signifikan baik dari aspek teknis maupun administratif, serta capaian kinerja dan penyerapan keuangan menunjukkan hasil yang optimal. Kondisi tersebut didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang mencukupi dan kompeten, serta perencanaan alokasi anggaran yang disusun secara matang dan terukur.

Meskipun pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik, diperlukan rencana tindak lanjut sebagai langkah strategis untuk menjaga konsistensi kinerja, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, serta mengantisipasi potensi risiko pada periode selanjutnya. Rencana tindak lanjut ini disusun sebagai bentuk komitmen berkelanjutan dalam memastikan pencapaian target kinerja dan optimalisasi penyerapan anggaran hingga akhir tahun anggaran. Adapun rencana tindak lanjut yang disusun yaitu sebagai berikut:

1. **Mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia**

Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan serta memastikan pembagian tugas dan tanggung jawab tetap proporsional. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui pembinaan, koordinasi rutin, dan penguatan pemahaman terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku.

2. **Penguatan perencanaan dan pengendalian anggaran**

Menjaga konsistensi perencanaan alokasi anggaran yang telah disusun secara matang dengan melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara periodik, guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja.

3. **Optimalisasi koordinasi dan komunikasi internal**

Meningkatkan koordinasi antarunit dan tim pelaksana kegiatan melalui rapat rutin dan mekanisme pelaporan yang terstruktur, sehingga potensi permasalahan teknis maupun administratif dapat diantisipasi sejak dini.

4. **Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi**

Melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, termasuk penyusunan laporan evaluasi sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

5. **Antisipasi risiko dan keberlanjutan kinerja**

Mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin muncul pada triwulan selanjutnya serta menyiapkan langkah mitigasi yang diperlukan, agar capaian kinerja dan penyerapan keuangan tetap terjaga secara optimal hingga akhir tahun anggaran.



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA